

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Jalur Sepeda Menambah Kemacetan

JAKARTA - PDI Perjuangan menilai rencana jalur sepeda lemah yang diusulkan Pemrov DKI Jakarta dan belum matang. Alhasil, lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya. Palsalnya, semula mengusulkan anggaran Rp4,498 miliar bertambah menjadi Rp73,771 miliar.

"Perencanaan yang lemah mengakibatkan lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya. Contohnya, tadi dari Rp4 miliar naik naik menjadi Rp73 miliar, ini kan soal perencanaan. Kalau perencanaanya baik, ada kajian yang baik, nggak mungkin sampai itu terjadi," ungkap Gembong Warsono, ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (29/10/2019).

Gembong mengaku, setuju program jalur sepeda Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, seharusnya pemprov juga mempertimbangkan matang-matang mengenai aturan ini.

Ia menyarankan, agar uang puluhan miliar itu digunakan untuk program prioritas saja. Ia juga mengingatkan agar Anies beserta jajarannya selalu memikirkan skala prioritas dalam menyusun anggaran atau program, bahkan Gembong juga meminta Pemprov untuk meminimalisir anggaran itu.

"Perencanaan kita perencanaan Pemprov DKI harus jeli melihat mana yang menjadi skala prioritas kita gitu loh, jadi memang karena perencanaan kita lemah, memang ini kan soal perencanaan," katanya.

"Diminimalisir aja, bahwa jalur sepeda penting, saya sepakat, tapi alokasi nggak sebesar itulah, gimana musti ada kajian ulang untuk bisa meminimalisir anggaran yang sekitar Rp73 miliar itu," jelas dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempersoalkan meroketnya usulan anggaran pembangunan jalur sepeda. Hal itu diusulkan Dinas Perhubungan



Tadi dari Rp4 miliar naik naik menjadi Rp73 miliar, ini kan soal perencanaan."

Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI

dan Transportasi Rp69 miliar dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.

"Tolong dicek ini teman-teman dewan. Setahu saya, pembangunan jalur sepeda awalnya diajukan Rp6 miliar. Kok tiba-tiba meroket jadi Rp69 miliar. Ini naik 10 kali lipat, lho," ujar Pandapotan Sinaga, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta di ruang rapat Komisi B di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan perencanaan dan urgensi pembangunan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di ibu kota. Palsalnya, dilihat pembangunan jalur sepeda justru mengakibatkan berkurangnya jalur untuk kendaraan umum dan pribadi.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mengkritik keras kebijakan pembangunan jalur sepeda yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan.

Menurut dia, keberadaan jalur sepeda hanya menambah kemacetan. "Saya minta Dishub DKI memaparkan grand design pembangunan jalur sepeda. Kalau tidak mampu ditunjukkan, saya rekomendasikan dicoret saja," ucapnya dilokasi yang sama. (aen)